Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 24, No 3 (2024): Oktober, 2846-2851
DOI: 10.33087/jiubj.v24i3.5561

Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Financial Distress* pada Pemerintahan Provinsi di Sumatera

Regyna Rachmadilla Anjani, Maria, Rossy Armaini
Politeknik Negeri Sriwijaya
Correspondence: regyna.rachmadilla@gmail.com, mariamardjuki@polsri.ac.id, rosyarmaini@polsri.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* pada pemerintahan provinsi di Sumatera ditinjau melalui derajat desentralisasi, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan. Metode pengujian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder pada LHP yang diperoleh melalui website BPK RI pada tahun 2018-2022. Populasi yang digunakan meliputi seluruh provinsi yang terdapat pada pulau Sumatera yang berjumlah 10 provinsi tahun anggaran 2018-2022 dan setiap anggota populasi diambil sebagai sampel menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga unit pengamatan dalam peneitian ini sebanyak 50 sampel. Penelitian ini menggunakan Eviews dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel derajat desentralisasi, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan terhadap *financial distress* pada pemerintahan provinsi di Sumatera, secara parsial derajat desentralisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan *budgetary solvency ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress* dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pada pemerintahan provinsi di Sumatera selama periode 2018-2022.

Kata Kunci: derajat desentralisasi; *budgetary solvency ratio*; rasio pertumbuhan.

Abstract. *This research aims to examine the factors that influence financial distress in provincial governments in Sumatra in terms of the degree of decentralization, budgetary solvency ratio and growth ratio. The testing method uses a quantitative approach with secondary data on LHP obtained via the BPK RI website in 2018-2022. The population used includes all provinces on the island of Sumatra, totaling 10 provinces for the 2018-2022 fiscal year and each member of the population was taken as a sample using a saturated sampling technique, so that the observation units in this research were 50 samples. This research uses Eviews to analyze the data. The results of the research show that simultaneously there is a significant influence between the variables degree of decentralization, budgetary solvency ratio and growth ratio on financial distress in provincial governments in Sumatra, partially the degree of decentralization has a negative and significant influence on financial distress, while the budgetary solvency ratio has a positive and significant influence on financial distress and the growth ratio does not have a significant effect on financial distress in provincial governments in Sumatra during the 2018-2022 period.*

Keywords: *degree of decentralization, budgetary solvency ratio, growth ratio.*

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dalam pemerintahan, memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi mereka sendiri. Otonomi daerah adalah keadaan dimana pemerintah daerah duberikan hak, kekuasaan, dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola pekerjaan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat berdasarkan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6). Penelitian Illahi et al (2021) mengungkapkan, semenjak penerapan otonomi daerah, tanggung jawab mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk pembangunan daerah maupun penyediaan layanan kepada masyarakat diberikan ke pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ombudsman RI (2022) mengenai tingkat pelayanan publik, menunjukkan fakta hanya 55,88% pemerintah provinsi di Indonesia memiliki rapor hijau. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya tingkat pelayanan publik pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian Zakia & Setiawan (2021) menyatakan bahwa kurangnya pelayanan publik menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Akibatnya, pemerintah tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya, seperti menyediakan dana untuk infrastruktur pelayanan publik, karena kondisi keuangan yang kurang stabil. Hal ini menandakan buruknya kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini.

Ketidakmampuan pemerintah menyediakan infrastruktur karena minimnya belanja modal yang dikeluarkan, padahal belanja tersebut dapat mendukung dalam memberikan pelayanan publik. Proporsi belanja modal yang tinggi terhadap total belanja daerah merupakan penanda kualitas belanja yang baik. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 menetapkan sasaran belanja modal provinsi sebesar 30%. Namun, kenyataannya pada tahun 2022 rata-rata belanja modal provinsi di Sumatera sebesar 18%, dimana tidak ada satupun provinsi yang mencapai target yang telah ditetapkan.

Belanja modal yang rendah menyebabkan pembangunan infrastruktur yang rendah, tidak memadainya pelayanan, sehingga berpotensi mengalami financial distress bagi pemerintah daerah tersebut. Financial distress merupakan keadaan di mana pemerintah tidak mampu menyediakan layanan atau fasilitas publik berdasarkan standar yang telah ditetapkan, karena kekurangan dana untuk menginvestasikan pada infrastruktur publik. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja modal yang minim dan belanja rutin kurang produktif lebih banyak digunakan. Penelitian Sari & Arza (2019) menemukan bahwa *financial distress* disebabkan oleh kurangnya dana untuk investasi infrastruktur publik karena alokasi belanja modal yang minim dan banyaknya penggunaan dana untuk belanja rutin yang kurang produktif.

Woodward (2007) dalam Discussion of Jones and Walker dalam Indriaty (2018) menggunakan 2 (dua) indikator di sektor pemerintahan, yaitu indikator keuangan dan non-keuangan untuk melihat kondisi *financial distress* negara bagian di Australia. Indikator keuangan meliputi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan berbagai rasio kinerja keuangan. Indikator non-keuangan meliputi sifat-sifat dewan dan mutu pelayanan publik. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Illahi et al. (2021), namun memiliki variabel berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan.

Pengembangan Hipotesis

Derajat Desentralisasi dan Financial Distress

Semakin tinggi derajat desentralisasi menunjukkan semakin besar peran PAD, karena PAD lebih banyak digunakan dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi, sehingga pemerintah dapat mengimplementasikan lebih banyak kebijakan dalam mengoptimalkan belanja modal. Penelitian Elfiyana & Arza (2022) menemukan bahwa derajat desentralisasi pemerintah yang tinggi mengurangi kemungkinan mengalami *financial distres*s, karena alokasi PAD yang lebih besar digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga hipotesis (H1) pada penelitian ini diduga derajat desentralisai mempunyai pengaruh terhadap *financial distress* pada pemerintahan provinsi di Sumatera

Budgetary Solvency Ratio dan Financial Distress

Perbandingan antara total pendapatan yang dikeluarkan untuk membiayai total belanja dapat diukur menggunakan budgetary solvency ratio. Penelitian Lailiyah & Desitama (2024) menemukan bahwa tingginya nilai dari rasio ini menunjukkan pendapatan pemerintah daerah mampu mendanai belanja daerahnya secara efektif, termasuk belanja yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi kelompok masyarakat, sehingga rendah kemungkinan terjadinya financial distress. Sehingga hipotesis (H2) dalam penelitian ini adalah diduga *budgetary solvency ratio* mempunyai pengaruh terhadap *Financial Distress* pada pemerintahan provinsi di Sumatera.

Rasio Pertumbuhan dan Financial Distress

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan keuangan daerah serta mengidentifikasi aspek-aspek keuangan daerah yang membutuhkan perhatian. Penelitian Wulandari & Arza (2020) menemukan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan alokasi belanja modal secara efektif dan melampaui standar yang ada, serta kemampuan pemerintah daerah dalam berinvestasi dengan baik, tercermin dari rasio pertumbuhan yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadinya financial distress pada pemerintah daerah. Sehingga hipotesis (H3) pada penelitian ini adalah diduga rasio Petumbuhan Berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada pemerintahan provinsi di Sumatera

Derajat Desentralisasi, Budgetary Solvency Ratio dan Rasio Pertumbuhan dan Financial Distress

Derajat desentralisasi, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan menjadi

faktor penting dalam pengaruh terhadap financial distress pemerintah provinsi di Sumatera yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan belanja modal. Derajat desentralisasi mengindikasikan seberapa besar peran PAD sebagai kekuatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur daerahnya, sehingga memiliki kemungkinan kecil untuk mengalami financial distress. Kemampuan total pendapatan yang memadai untuk mendanai belanja daerah yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat luas, sehingga potensi terjadinya financial distress dapat berkurang. Menilai kemampuan pemerintah daerah mengelola pendapatan keuangan daerahnya dapat dilakukan melalui rasio pertumbuhan. Nilai positif pada rasio pertumbuhan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah berhasil mengalokasikan belanja modalnya, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami *financial distress*. Sehingga hipotesis (H4) dalam penelitian ini adalah diduga derajat desentralisasi, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap *financial distress* pada pemerintahan provinsi di Sumatera.

METODE

Penelitian yang dilakukan menerapkan pendekatan kuantitatif menggunakan sumber data sekunder laporan keuangan pada pemerintahan provinsi di Sumatera selama periode 2018–2022. Populasi yang digunakan adalah seluruh provinsi di Sumatera yang terdiri dari 10 Provinsi, sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga setiap anggota dalam populasi dijadikan sebagai sampel, yaitu sejumlah 50 sampel dengan unit observasinya adalah 50 laporan keuangan pemerintah provinsi di Sumatera periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan alat bantuan penelitian berupa e-views (*econometric views*) dalam melakukan analisis data. Proses ini melibatkan penetapan tingkat signifikansi, serta menentukan landasan dalam pembuatan kesimpulan berdasarkan penerimaan atau penolakan hipotesis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta 1X1it + \beta 2X2it + \beta 3X3it + e$$

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.119476	(9,37)	0.3738
Cross-section Chi-square	12.041513	9	0.2110

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh *probability cross-section chi-square* sebesar 0,2110 dimana 0,2110 < 0,05. Artinya, *common effect model* yang terpilih. Sedangkan Tabel 2 diketahui *probability cross-section random* sebesar 0,6596 dimana 0,6596 > 0,05. Artinya, *random effect model* yang terpilih.

Tabel 2
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.599218	3	0.6596

Sumber: data olahan

Tabel 3
Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.002239	12.59794	12.60018
	(0.9623)	(0.0004)	(0.0004)
Honda	-0.047318	3.549358	2.476316
	(0.5189)	(0.0002)	(0.0066)
King-Wu	-0.047318	3.549358	2.926997

	(0.5189)	(0.0002)	(0.0017)
Standardized Honda	0.395361	5.003345	0.227877
	(0.3463)	(0.0000)	(0.4099)
Standardized King-Wu	0.395361	5.003345	1.010216
	(0.3463)	(0.0000)	(0.1562)
Gourieroux, et al.	--	--	12.59794
			(0.0007)

Sumber: data olahan

Tabel 3 menunjukkan nilai probabilitasya yaitu 0,9623 dimana 0,9623 > 0,05. Artinya, model *common effect* yang terpilih. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah model *common effect.* Tabel 4 nilai *correlation* setiap variabel yaitu kurang dari 0,85. Artinya, bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan Tabel 5, tersebut, nilai *probability* pada setiap variabel < 0,05. Artinya, dapat diambil kesimpulan tidak terjadinya heteroskedasitas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
Derajat Desentralisasi	1.000000	-0.073891	0.277711
Budgetary Solvency Ratio	-0.073891	1.000000	0.073891
Rasio Pertumbuhan	0.277711	0.011191	1.000000

Sumber: data olahan

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedasitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.013858	0.029987	-0.462143	0.6462
Derajat Desentralisasi	0.036685	0.031630	1.159830	0.2521
Budgetary Solvency Ratio	0.018546	0.022497	0.824376	0.4140
Rasio Pertumbuhan	0.027017	0.025520	1.058641	0.2953

Sumber: data olahan

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.131531	0.048717	2.699920	0.0097
Derajat Desentralisasi	-0.161354	0.051385	-3.140080	0.0029
Budgetary Solvency Ratio	0.090305	0.036548	2.470890	0.0172
Rasio Pertumbuhan	-0.015154	0.041460	-0.365518	0.7164

Sumber: data olahan

Tabel 6 hasil analisis yang dilakukan menggunakan *common effect model*. Maka hasil analisis menghasilkan persamaan sebagai berikut: Y = 0,1315 – 0,1614X1 + 0,0903X2 – 0,0152X3 + e. Berdasarkan model regresi dapat diketahui nilai konstanta (α) adalah 0,1315, yang mengindikasikan apabila variabel independen memiliki nilai 0, maka *financial distress* bernilai positif 0,1315. Koefisien variabel X_1 ditunjukkan dengan nilai 0,1614, koefisien variabel X_2 yaitu 0,0903 serta koefisien X_3 yaitu 0,0152. Berdasarkan hal ini artinya setiap terjadinya peningkatan 1 satuan dari X1 menyebabkan nilai Y turun sebesar 0,1614, sedangkan peningkata X_2 menyebabkan nilai Y naik sebesar 0,0903 dan peningkatan 1 satuan dari X_3 menyebabkan nilai Y turun sebesar 0,0152, dengan mengansumsikan bahwa variabel independen lainnya memiliki nilai tetap.

Tabel 6 juga menunjukkan nilai dari t hitung dan *probability* dari masing-masing variabel. Nilai t hitung derajat desentralisasi sebesar 3,140080 > 2,01290 dan signifikansinya bernilai 0,0029 < 0,05, artinya H_1 diterima. Sementara itu, pada *budgetary solvency ratio* nilai t hitung sebesar 2,470890 > 2,01290 dan

signifikansinya bernilai 0,0172 < 0,05, artinya H_2 diterima. Rasio pertumbuhan memilikinilai t hitung sebesar 0,365518 < 2,01290 dan signifikansinya bernilai 0,7164 > 0,05, artinya H_3 ditolak. Berdasarkan penjelasan tersebut, derajat desentralisasi dan *budgetary solvency ratio* secara parsial mempunyai pengaruh, sedangkan rasio pertumbuhan secara parsial tidak berpengaruh.

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.291406
Adjusted R-squared	0.245193
S.E. of regression	0.032445
Sum squared resid	0.048424
Log likelihood	102.5477
F-statistic	6.305754
Prob(F-statistic)	0.001128

Sumber: data olahan

Berlandaskan Tabel 7 dapat diketahui koefisien determinasi tersebut, dapat diketahui *Adjusted R-squared* bernilai 0,245193. Nilai tersebut mengindikasikan variabel dependen dijelaskan sebesar 24,52% oleh variabel independen. Sementara itu, sisanya sebesar 75,48% dapat dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Tabel 7 juga memperlihatkan hasil uji statistik-F yang menunjukkan nilai F hitung adalah sebesar 6,305754 > 2,806844929 dan nilai sig. yaitu 0,001128 < 0,05, maka variabel dependen (derajat desentralisasi, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan) secara simultan dipengaruhi variabel independen (*financial distress*).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengumgkapkan bahwa seraca simultan terdapat pengaruh signifikan pengaruh derajat desentralisasi, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan pada pemerintahan provinsi di Sumatera selama periode 2018-2022. Namun secara parsial derajat desentralisasi mempunyai pengaruh negatif terhadap *financial distress* pada pemerintahan provinsi di Sumatera. Sementara itu, *budgetary solvency ratio* mempunyai pengaruh positif terhadap *financial distress* pada pemerintahan provinsi di Sumatera dan rasio pertumbuhan tidak mempunyai pengaruh terhadap *financial distress* pada pemerintahan provinsi di Sumatera selama periode 2018-2022.

DAFTAR PUSTAKA

Elfiyana, & Arza, F. I. 2022. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(2), 425–437.

Illahi, F., Haryati, R., & Silvera, D. L. 2021. Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017. *Pareso Jurnal*, 3(3), 543–556.

Indriaty, N. 2018. Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia. *Seminar Nasional dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi*, 319–337.

Lailiyah, N. I., & Desitama, F. S. 2024. Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas Anggaran dan Rasio Pertumbuhan terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah. *Religion Education Social Laa Roiba Journal (Reslaj)*, 6(2), 1952–1973.

Ombudsman RI, 2022, Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022, Jumlah Instansi Masuk Zonasi Hijau Meningkat, diakses melalui website https://ombudsman.go.id/artikel/r/--penganugerahan-predikat-kepatuhan-standar-pelayanan-publik-2022--jumlah-instansi-masuk-zonasi-hijau-meningkat

Sari, M., & Arza, F. I. 2019. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425–1436.

Wulandari, Y., & Arza, F. I. 2020. Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2(3), 3179–3196.

Woodward, Ross., 2007. Discussion of Jones and Walker, *Abacus, Accounting Foundation*, University of Sydney, 43(3), 419-427

Zakia, R., & Setiawan, M. A. 2021. Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik

Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(3), 653–671.